



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Biaya Buat LPj DD Rp 18 Juta

ARGA MAKMUR - Penyidikan kasus dugaan korupsi Dane Desa (DD) Kali terus berjalan. Penyidik berencana memanggil beberapa saksi lagi termasuk orang yang dibayar tersangka Sadi Darmanto Kades Kali non aktif untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPj) DD.

Kasi Intel Kejari Bengkulu Utara (BU), Denny Agustian, SH, MH mengatakan Sadi Darmanto saat ini sudah dilakukan penahanan. Kasus ini juga masih dilakukan pengembangan. Sehingga tidak menutup kemungkinan bakal ada penambahan tersangka jika ada petunjuk baru.

Denny menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap tersangka Sadi, diakui tersangka bahwa LPj DD tahun 2020 dibuat oleh rekannya yang menjabat sebagai Sekdes di desa lain. Untuk membuat LPj tersebut, Sadi mengeluarkan uang Rp 18 juta tanpa harus melengkapi dengan bukti-bukti pelaksanaan anggaran.

"Kita akan telusuri, kita panggil untuk diminta keterangan jika memang LPj yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, dan bukan oleh pejabat yang berwenang di desa," terang Denny.

Kejari saat ini masih menunggu hasil audit Inspektorat untuk memastikan kerugian negara. "Kita tetap meminta Inspektorat melakukan audit kerugian negara sebagai pejabat yang berwenang," ujar Denny.

Di bagian lain, Kejari BU kemarin (2/9) melakukan serah-terima jabatan Kasi Pidsus lama dengan yang baru. Kasi Pidsus

lama, Nofridiansyah, SH diganti Kasi Pidsus baru, M. Angga Mahatama yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Intel Kejari Lampung Tengah. Sementara Nofri pindah ke Kejari Ciamis.

Kajari BU Elwin Agustian Khahar, SH mengingatkan Kasi Pidsus yang baru harus segera menyesuaikan diri dan bekerja. Apalagi saat ini ada satu kasus korupsi ke penyidikan dan sudah dilakukan penahanan dan satu

lagi masih dalam masa pengumpulan data.

"Agenda kerja sangat padat. Ini sudah memasuki September, jangan sampai ada tunggakan kasus di tahun depan," tegas Elwin. (qla)